



2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi
Albantani – Serang

IKHTISAR

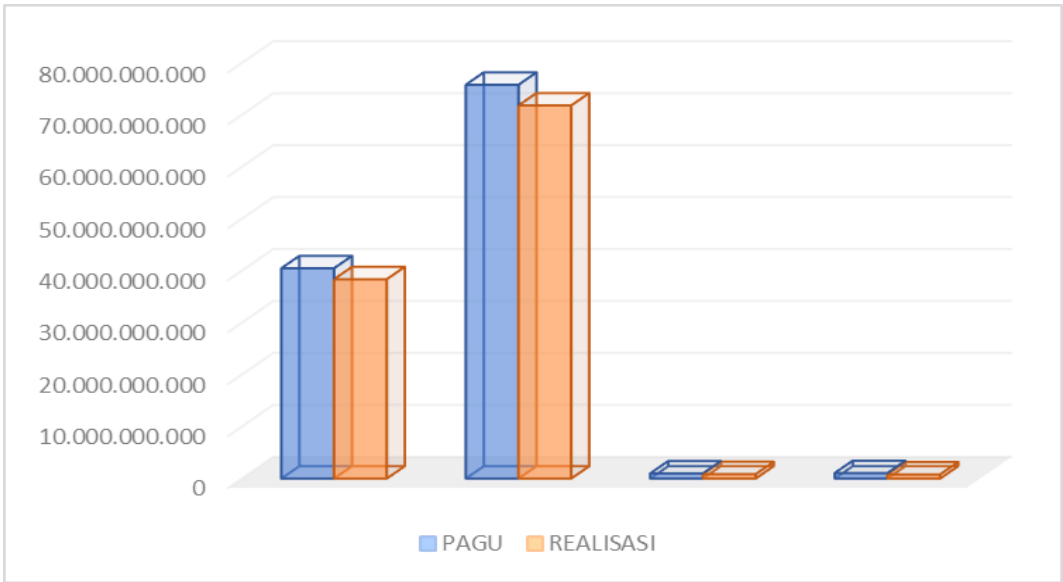
EKSEKUTIF

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2024 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 111.516.129.104,00 dimana sampai dengan bulan September 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 48.195.854.193,00 dengan prosentase capaian sebesar 43,22%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 111.516.129.104,00 menjadi Rp. 118.141.592.380,00 atau bertambah sebesar Rp. 6.625.463.276,00 dimana pada akhir penggaran perubahan 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 111.551.990.171,00 dengan prosentase capaian sebesar **94,42%**.

NO	URAIAN	PAGU	RALISASI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.484.657.100	38.371.001.263
2	Program Penyelenggaraan LLAJ	75.810.981.280	71.827.349.466
3	Program Pengelolaan Pelayaran	992.109.000	846.883.707
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.057.493.000	799.419.807
		111.516.129.104	118.141.592.380



Dinas Perhubungan Provinsi Banten Pada Tahun 2024 memiliki 4 (empat) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk Urusan Perhubungan.

Capaian Kinerja dari beberapa indicator Pada tahun 2023 ini bergaam sebagaimana penjelasan di bawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	73,16	76,23	104,20
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	70,00	70,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80,00	86,17	107,71
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	21,00	24,72	84,95

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan baik.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	I-1
1.3. DASAR HUKUM	I-1
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	I-3
1.5. ISU – ISU STRATEGIS	I-6
1.6. PROSES BISNIS	I-6
1.7. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023	I-9
1.8. SISTEMATIKA PENULISAN	I-10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026	II-1
2.2.1. VISI DAN MISI	II-1
2.2.2. TUJUAN DAN SASARAN	II-2
2.2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	II-2
2.2. PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024	II-4
2.3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	III-1
3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024	III-1
3.1.2. MEMBANDINGKAN ANATARA TARGET DAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN LALU	III-13
3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI	III-32
3.1.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL	III-33
3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN PENURUNAN KINERJA	III-33
3.1.6. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN	III-38

SUMBER DAYA	
3.1.7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	III-45
3.2. REALISASI ANGGARAN	III-61
 BAB IV PENUTUP	 IV-1
4.1. KESIMPULAN	IV-1
4.2. SARAN DAN REKOMENDASI	IV-2
 LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA	
2. SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH INSPEKTORAT	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	I-4
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I-4
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	I-5
Tabel 1.4. Cascading Dinas Perhubungan Provinsi Banten	I-8
Tabel 1.5. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	I-9
Tabel 2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-3
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024	II-3
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-9
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-9
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	II-9
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi	II-11
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Angkutan Jalan	II-12
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengembangan	II-12
Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan	II-12
Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Prasarana Jalan	II-12
Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	II-12
Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas	II-13
Tabel 2.14. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	II-13
Tabel 2.15. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas	II-13
Tabel 2.16. Perjanjian Kinerja Kepala Laut Udara Dan Perkeretaapian	II-14
Tabel 2.17. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kepelabuhan Dan ASDP	II-14
Tabel 2.18. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perhubungan Udara Dan Perkeretaapian	II-14
Tabel 2.19. Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	II-14
Tabel 2.20. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt Pengelolaan Prasarana Perhubungan	II-15
Tabel 2.21. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat Dan Pengendalian Operasional Angkutan	II-15
Tabel 2.22. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat Dan Pengendalian Operasional Angkutan	II-16
Tabel 2.23. Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Banten	II-16
Tabel 2.24. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis	II-17
Tabel 2.25. Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten Anggaran Perubahan Tahun 2024	II-17
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-1
Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	III-2
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Program Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024	III-2
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	III-4
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Lalu	III-14
Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Lalu	III-15

Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Tahun Lalu	III-18
Tabel 3.8. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Renstra	III-32
Tabel 3.9. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	III-36
Tabel 2.10. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan	III-39
Tabel 3.11. Tingakt Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan	III-40
Table 3.12 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perhubngan Provinsi Banten	III-41
Tabel 3.13. Analisis Program Kegiatan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja	III-46
Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	III-62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan	I-4
Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status	I-5
Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	I-5
Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan	I-5
Gambar 1.5. Peta proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten	I-6
Gambar 1.6. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (1)	I-7
Gambar 1.7. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (2)	I-7
Gambar 1.8. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (3)	I-7
Gambar 1.9. Peta relasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten	I-8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 (dua) dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, di tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki anggaran murni sebesar Rp. 110.437.329.104,- dan anggaran perubahan sebesar Rp. 118.141.592.380,- bertambah sebesar Rp. 7.704.263.276,- atau bertambah sebanyak 6,52% dibanding dengan anggaran murni.

Dalam penyelenggaraan pekerjaan Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 (empat) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dan pada tahun anggaran 2024 ini beberapa kegiatan dilakukan efisiensi anggaran diantaranya gaji dan tunjangan, perjalanan dinas serta beberapa kegiatan yang tidak mendukung capaian indikator kinerja utama.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2023 -2026;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5025)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2023;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Sunan Organisasi dan tata Kerja;
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

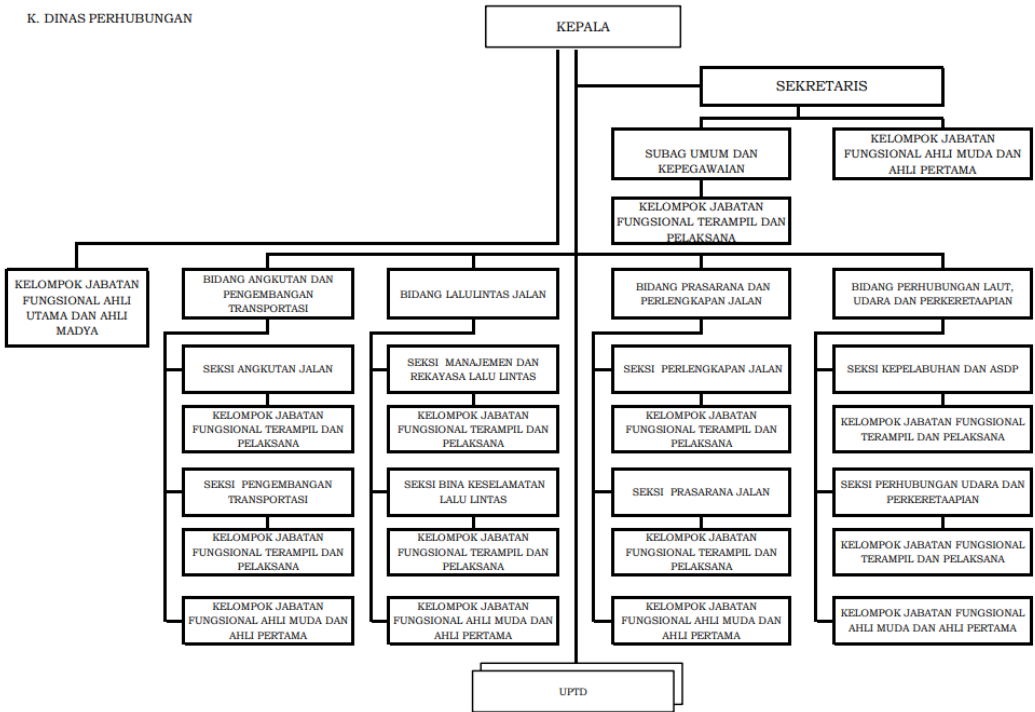
TUGAS POKOK

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

FUNGSI DAN WEWENANG

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan wewenang:

- a. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- b. Pengelolaan Pelayaran;
- c. Pengelolaan Penerbangan;
- d. Pengelolaan Perkeretaapian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undang.



Gambar 1.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan

KEADAAN PEGAWAI

Berdasarkan data Kepegawaian tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten Memiliki jumlah pegawai sebanyak 351 orang dimana 95 orang bersatatus sebagai PNS dan 256 orang bersatus sebagai Non PNS.

untuk lebih jelas mengenai data jumlah pegawai Dinas Perhubungan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Bersasarkan Status

STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	75	18	93
NON PNS	214	39	253
JUMLAH	289	57	346

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasrkan Pendidikan

Jenjang	PNS	Non PNS	Jumlah
SD	-	1	1
SMP		4	4
SMA	23	155	178
DIPLOMA	4	11	15
S.1	40	82	122
S.2	26	0	26
JUMLAH	93	253	346

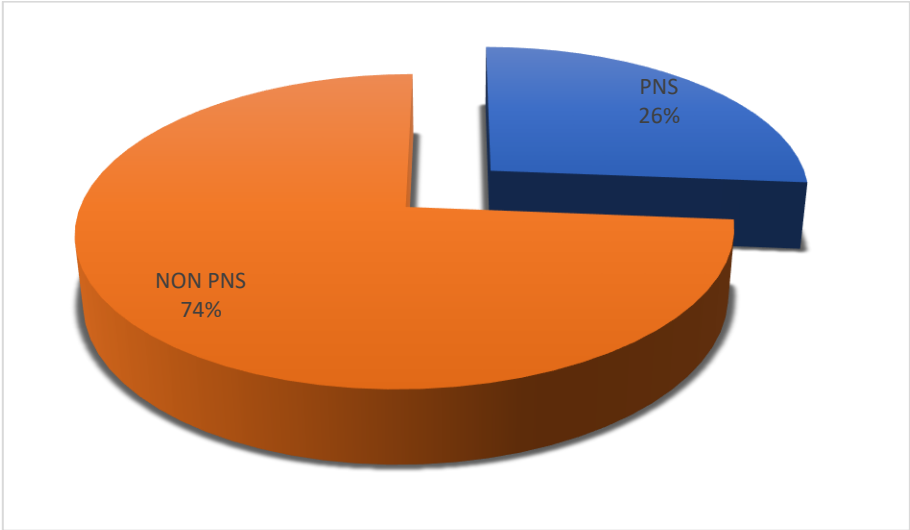
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten



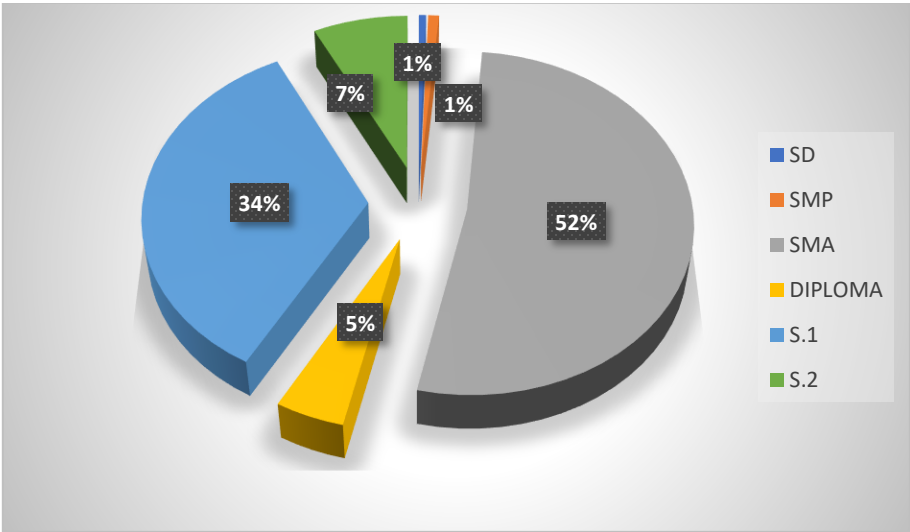
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasrkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	I		II				III				IV					JML
Gol/Ruang	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E	
Jumlah	0	0	4	0	16	1	6	7	7	32	14	5	0	1		93

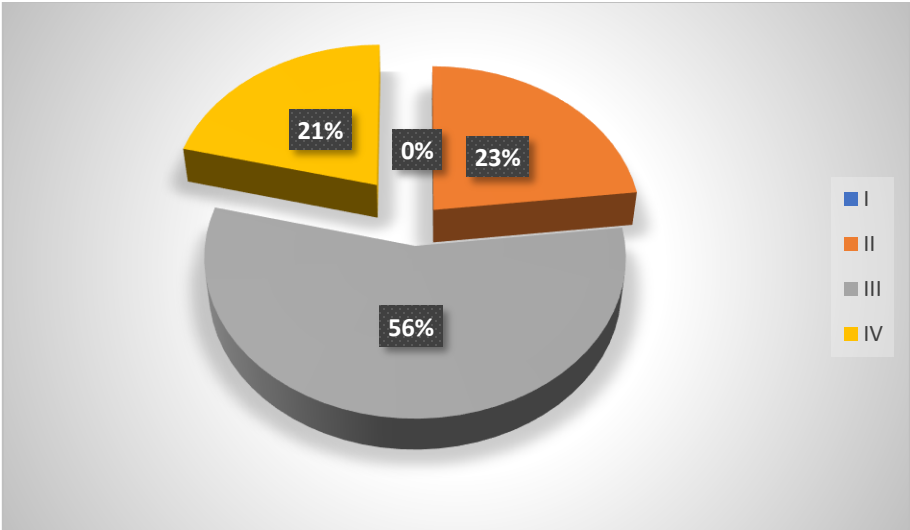
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Gambar 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan status



Gambar 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



Gambar 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

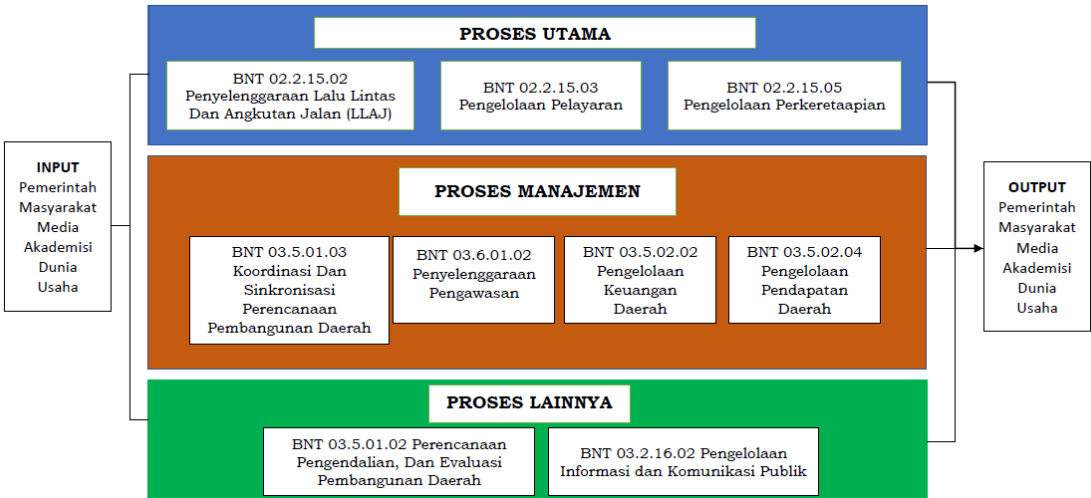
1.5. ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 memiliki isu strategis sebagaimana berikut:

1. Penanganan kemacetan yang perlu penanganan secara serius dan intens;
2. Pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan pemeliharaan/ penggantian;
3. Pemenuhan Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
4. Pengembangan sarana angkutan umum masal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;
5. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di perkotaan Serang Metropolitan Area (SMA);
6. Pembangunan Terminal Tipe-B;
7. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional;
8. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.

1.6. PROSES BISNIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten tentunya memiliki mitara kerja agar pelaksanaan pekerjaan menjadi efektif dan efisien oleh karena itu perlu di susun sebuah peta proses bisnis agar memudahkan dalam komunikasi kepada pihak interna mau pun pihak eksternal. Untuk lebih jelas mengenai peta proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar – gambar di bawah ini.



Gambar 1.5. Peta proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024



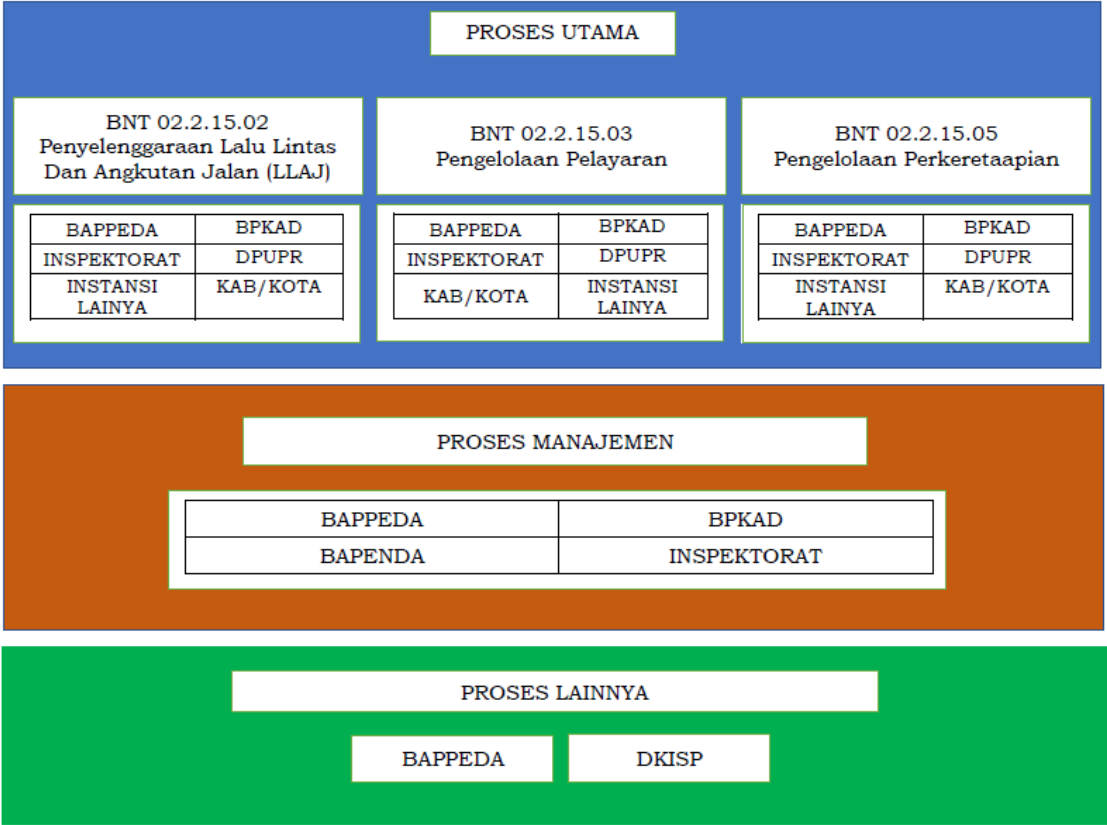
Gambar 1.6. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (1)



Gambar 1.7. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (2)



Gambar 1.8. Peta sub proses bisnis Dinas Perhubungan Provinsi Banten (3)



Gambar 1.9. Peta relasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

CASCADING

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah

untuk lebih jelas mengenai *Cascading* Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. *Cascading* Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Visi : Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraa pemerintah daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran Dan pengendalian
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Secara Merata dan Berkeadilan			
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Meningkatkan kualitas jalan provinsi	Pemenuhan kebutuhan perkelengkapan jalan
		Penetapan kebijakan	Penetapan kebijakan dan sosialisasi penataan



Visi : Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		transportasi	transportasi
		Optimalisasi kinerja jaringan pelayanan angkutan umum	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
		Optimalisasi pelayanan pengawasan angkutan umum	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
		Peningkatan Ketersediaan prasarana transportasi	Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi
		Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
		Peningkatan perkeretaapian	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah provinsi
		Peningkatan keselamatan dan koordinasi angkutan pelayaran, angkutan laut dan penerbangan	Penyelenggaraan keselamatan dan koordinasi angkutan pelayaran, angkutan laut, dan penerbangan

Sumber: Renstra Perubahan 2023-2026 Dinas Perhubungan

1.7. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten mendapat 7 (tujuh) point evaluasi, yang telah dilakukan oleh tim nasional penilaian SAKIP Provinsi Banten tahun 2023.

Untuk lebih Jelas mengenai hasil evaluasi SAKIP 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Hasil Evaluasi SAKIP 2023	Tindak Lanjut
1.	Memperbaiki dokumen <i>cascading dan crosscutting</i> melalui kordinasi dan konsultasi dengan Bappeda Provinsi Banten	Dinas Perhubungan telah melaksanakan perbaikan cascading dan crosscutting dengan Bappeda Provinsi Banten
2.	Menyusun dokumen rencana aksi dan perubahannya dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023	Dinas Perhubungan telah Menyusun dokumen rencana aksi dan perubahannya dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023
3.	Dalam Menyusun dokumen Rencana Kerja Haru Memperhatikan hal-hal sebagai berikut:	
a.	Sistematika yang disusun mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Dinas Perhubungan menyusun RENJA seuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
b.	Menguraikan secara jelas permasalahan yang terjadi pada triwulan II yang menjadi dasar dalam perbaikan	Telah tertuang dalam dokumen RENJA Perubahan seuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



No	Hasil Evaluasi SAKIP 2023	Tindak Lanjut
4.	Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:	
a.	Menetapkan penanggungjawab pengumpul data kinerja masing-masing bidang	Dinas Perhubungan telah menyusun SK Penanggung Jawab Pengumpul Kinerja
b.	Menyajikan analisis strategi dan kebijakan atas permasalahan yang terjadi pada laporan monitoring dan evaluasi	Dinas Perhubungan Telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi
5.	Menyusun laporan capaian kinerja pada setiap bidang atas hasil capaian kinerja program dan kegiatan setiap triwulan	Telah disusun kinerja pada setiap bidang atas hasil capaian kinerja program dan kegiatan setiap triwulan
6.	Melakukan perbaikan dokumen laporan kinerja pada hal-hal sebagai berikut:	
a.	Menyesuaikan keselarasan informasi kinerja antar bab (Nomenklatur, Indikator dan target kinerja sasaran, program dan kegiatan) dengan Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja	Dinas Perhubungan telah menyesuaikan bab (Nomenklatur, Indikator dan target kinerja sasaran, program dan kegiatan) dengan Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja
b.	Menyajikan capaian Indikator kinerja sasaran pada informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Dinas Perhubungan telah menyajikan capaian Indikator kinerja sasaran pada informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dengan Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja
c.	Menguraikan upaya perbaikan yang telah dilakukan atas permasalahan yang terjadi	Dinas Perhubungan telah menyapaikan perbaikan dari permasalahan dan solusi pada laporan kinejra
7.	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Banten tentang penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Dinas Perhubungan melakukan evaluasi kinerja setiap bulan nya dengan Bappeda menggunakan aplikasi SIMRAL

Sumber: LHE AKIP Provinsi Banten 2023

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini terdiri dari Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, tugas dan fungsi, Proses Bisnis sampai evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja serta menyajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilita kinerja. Disajikan pula akuntabilitas keungan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

BAB ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi



BAB II

PERENCANAAN KINEREJA

2.1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026

Tahun 2023 merupakan Tahun pertama memasuki era Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, namun seiring dengan kebijakan baru terkait susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang baru dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berimbas kepada kebijakan rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya, sehingga Rencana Strategis 2023-2026 turut mengalami perubahan.

Perubahan nomenklatur, susunan organisasi dan tata kerja tersebut membawa dampak beberapa perubahan dalam keberlangsungan operasional perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Banten, terutama dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, serta pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perubahan ini juga sekaligus memperbaiki target-target kinerja, kebijakan anggaran, agar perencanaan pembangunan dan proses pembangunan berjalan sebagaimana mestinya sehingga didapatkan hasil yang maksimal.

Meskipun demikian perubahan ini secara substansif masih sama dengan Renstra sebelumnya yang membedakan pengampu kegiatan dan sub kegiatan mengikuti SOTK yang baru.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan ini pada sektor perhubungan pada masa transisi 2023 - 2026 ini, selain mengacu pada RPJPD 2005 – 2025 dan RTRW Provinsi Banten, juga memperhatikan ketercapaian target RPJMD 2017 – 2022 (terdapat beberapa target dalam RPJMD yang belum tercapai).

2.1.1. VISI DAN MISI

Dalam penyelenggaraan pekerjaan Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”

Adapun Misi dari Pemerintah Provinsi Banten adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;



2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten mengemban **Misi 2** dan **Misi 4** yaitu **“Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan”** dan **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”**.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Banten 2023-2026, diuraikan dengan beberapa tujuan yang berisi pernyataan capaian didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Dalam tujuan disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai pada masa akhir tahap perencanaan.

Tujuan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023 – 2026 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, rasional, dan berjangka waktu tertentu. Sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Urusan perhubungan merupakan urusan bukan pelayanan dasar, sehingga kinerja Dinas Perhubungan mendukung capaian kinerja infrastruktur.

Sasaran dari tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 adalah:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan, penyediaan sarana, prasarana, dan keselamatan.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan.

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem manajemen atau implementasi teknologi.



Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Tabel 2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubunagan Provinsi Banten

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran Dan pengendalian
2	Meningkatkan kualitas jalan provinsi	Pemenuhan kebutuhan perkelengkapan jalan
3	Penetapan kebijakan transportasi	Penetapan kebijakan dan sosialisasi penataan transportasi
4	Optimalisasi kinerja jaringan pelayanan angkutan umum	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
5	Optimalisasi pelayanan pengawasan angkutan umum	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
6	Peningkatan Ketersediaan prasarana transportasi	Pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi
7	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
8	Peningkatan perkeretaapian	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah provinsi
9	Peningkatan keselamatan dan koordinasi angkutan pelayaran, angkutan laut dan penerbangan	Penyelenggaraan keselamatan dan koordinasi angkutan pelayaran, angkutan laut, dan penerbangan

Sumber: Renstra Perubahan 2023 – 2026 Dinas Perhubungan

PROGRAM

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 (empat) program untuk sebagai turunan srtategi dan kebijakan, dimana 4 program itu berupa:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 3. Program Penyelenggaraan Pelayaran;
- 4. Program Penyelenggaraam Perkeretaapian.



2.2. PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengacu pada dokumen Renstra Perubahan 2023 – 2026 dengan memperhatikan Cascading yang dimulai dari Tujuan, Sasara, Strategi dan Arah Kebijakan sehingga menghasilkan Program dan Kegiatan.

Berdasarkan Dokuemen Renstra Perubahan 2023 – 2026 Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024 memiliki 4 (empat) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
INDUK		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN
9)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
16)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah
17)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
18)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
24)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
26)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
27)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
9	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
28)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
29)	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
30)	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun
31)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia
32)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia
33)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
34)	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
35)	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
36)	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
37)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
38)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan
12	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
39)	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan
40)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
41)	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan
42)	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
43)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
III	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran
14	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
44)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
15	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
46)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian
16	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
47)	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)
48)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
49)	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
50)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)
52)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
19	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPTD
53)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan
III	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran
20)	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
54)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten



2.3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk penugasan dari pimpinan lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator kinerja.

Untuk lebih jelas mengenai Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningakntnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerinta	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah)	Nilai	70-80
2	Meningkatya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan	Ratio Konektivitas	Persen	0,73
		Ratio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,5
		Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Presentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Presentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITU NGAN	SATUAN	REALISASI EALISASI (Triwulan)	TARGET		Ket
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningakntnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerinta	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah)	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRTEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITU NGAN	SATUAN	REALISASI EALISASI (Triwulan)	TARGET		Ket
						MURNI	PERUBAHAN	
2	Meningkatya Kepuasan Pelayanan Publik	Capaian Pelayanan Perhubungan	Survei yang dilakukan Badan	Indeks	3	4	4	Target tidak sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	Persen	100
		Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	Persen	100
		Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	Persen	100
		Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	Persen	100
		Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	Persen	100
		Presentase ketercapaian dari	Persen	100	Persen	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
		seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
		Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	Persen	100
		Presentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	Persen	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Dokumen	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	Dokumen	1
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2	Dokumen	1



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	Dokumen	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	Laporan	5
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	Laporan	8
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	Orang/ Bulan	97
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Dokumen	12
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	Dokumen	12
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	Laporan	1



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
		Kuangan Akhir Tahun SKPD				
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	Dokumen	1
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	Laporan	18
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	Laporan	1
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	76	unit	76
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	Paket	14
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket	3	Paket	3
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Laporan	12
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraa	Laporan	12	Laporan	12



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
	dan Konsultasi SKPD	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	Dokumen	1
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	23	unit	15
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Laporan	12
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Laporan	12
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	59	unit	65
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	74	unit	74
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	unit	3

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Lalulintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	Persen	50	Persen	50
		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan masal	Persen	100	Persen	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Angkutan Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	unit	2	unit	2

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengembangan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	3	1	1
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	1	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	Persen	50	Persen	50

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Prasarana Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	unit	28	28	28
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	unit	14	14	14
3	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	1	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perlengkapan Jalan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	unit	1060	unit	1860
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	unit	110	unit	230

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan MRLl dan penyediaan, pemeliharaan jalan	Persen	100	Persen	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	Persen	100	Persen	100
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	Persen	20	Persen	20

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.14. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	7	Dokumen	6
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	3	Laporan	4
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1	Laporan	1
4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	unit	130	unit	217

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Tabel 2.15. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Bina Keselamatan Lalu Lintas

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Dokumen	1	Dokumen	1
2	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	4	Lokasi	19
3	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	unit	20	unit	20
4	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan	1	Laporan	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.16. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Laut Udara Dan Perkeretaapian

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Persen	100	Persen	100
		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	Persen	100	Persen	100
		Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	Persen	100	Persen	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.17. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kepelabuhan Dan ASDP

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Laporan	3	Laporan	4



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
	Laut Kewenangan Provins	Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				
2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	unit	2	unit	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.18. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perhubungan Udara Dan Perkeretaapian

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	6	Dokumen	5

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.19. Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Provinsi	Persen	100	Persen	100
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (UPTD)	Persen	100	Persen	100
3	Pengelolaan Pelayanan	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan Pada UPT Pengelola Prasarana Perhubungan	Persen	100	Persen	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Tabel 2.20. Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt Pengelolaan

Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	Paket	12
2	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Paket	1
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Laporan	12
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Laporan	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.21. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Sarana Perhubungan Darat Dan Pengendalian

Operasional Angkutan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan	unit	100	unit	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten



Tabel 2.22. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Laut Dan Udara UPT Pengelolaan

Prasarana Perhubungan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	MURNI		PERUBAHAN	
			SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	unit	2	unit	2

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten

ANGGARAN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2024 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 111.516.129.104,00 dimana sampai dengan bulan September 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 48.195.854.193,00 dengan prosentase capaian sebesar 43,22%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 111.516.129.104,00 menjadi Rp. 118.141.592.380,00 atau bertambah sebesar Rp. 6.625.463.276,00 dimana pada akhir penggaran perubahan 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 111.551.990.171,00 dengan prosentase capaian sebesar 94,42%.

TARGET BELANJA

Pada anggaran perubahan tahun 2024 memiliki target belanja terbagi kedalam beberpa jenis sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.23. Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Banten

NO	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-
I	Retribusi Daerah	-	-
B	BELANJA DAERAH		
I	Belanja Operasi	68.589.412.504	70.993.504.280
1	Belanja Pegawai	28.899.622.224	25.903.409.000
2	Belanja Barang dan Jasa	39.689.790.280	45.090.095.280
II	BELANJA MODAL	42.926.716.600	47.148.088.100
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.267.534.900	30.634.968.400
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.001.433.700	4.066.773.700
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.657.748.000	12.446.346.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Jumlah Belanja Daerah		111.516.129.104	118.141.592.380

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten

ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengalokasikan anggaran berdasrkan capaian dan sasaran strategis sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.24. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRTEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaran Pemerinta	40.484.657.100	34,21	-
2	Meningkatya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana dan Keselamatan Perhubungan	77.860.583.280	65,79	-

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 2.25. Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (RP)	PAGU PERUBAHAN (RP)
INDUK			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.402.749.824	37.592.403.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000	661.300.000
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000	153.000.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000	350.000.000
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	118.300.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.066.537.224	26.070.324.000
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.013.672.224	25.017.459.000
9)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885.950.000	885.950.000
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	88.325.000	88.325.000
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000	1.150.000
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	34.971.000	34.971.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (RP)	PAGU PERUBAHAN (RP)
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.944.000	34.944.000
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.525.000	7.525.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.500.000	9.500.000
15)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.500.000	9.500.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.000.000	93.250.000
16)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	53.000.000	93.250.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.931.200	644.198.200
17)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.500.000	307.500.000
18)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000	56.000.000
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000	55.000.000
20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.431.200	195.698.200
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	30.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.516.000	79.993.500
22)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.516.000	79.993.500
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.605.470.400	10.605.470.400
23)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.470.400	600.470.400
24)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.005.000.000	10.005.000.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.795.000	1.562.317.000
25)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000	1.169.364.000
26)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000
27)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	389.795.000	342.953.000
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	64.188.526.280	32.359.331.100
9	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	450.000.000	450.000.000
28)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000	250.000.000
29)	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200.000.000	200.000.000
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	30.588.118.080	36.616.109.580
31)	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	7.447.567.600	7.447.567.600
32)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins	18.246.486.05	22.662.300.050
33)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	346.212.800	346.212.800
34)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.547.851.630	6.160.029.130
11	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	180.000.000	180.000.000
35)	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	180.000.000	180.000.000
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	27.905.619.400	30.689.488.400,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (RP)	PAGU PERUBAHAN (RP)
35)	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.242.669.000	642.669.000
36)	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.800.260.000	2.785.896.000
37)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.000.000	50.000.000
38)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	24.812.690.400	27.210.923.400
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.392.540.000	5.586.771.500
39)	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	30.000.000	30.000.000
40)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1.212.540.000	5.496.468.500
41)	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	50.000.000	46.633.000,
42)	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	100.000.000	13.670.000
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.672.248.800	2.184.963.800
43)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.672.248.800	2.184.963.800
III	Program Pengelolaan Pelayaran	1.620.000.000	892.109.000
15	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1.270.000.000	542.109.000
44)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1.270.000.000	542.109.000
16	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350.000.000	350.000.000
45)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	350.000.000	350.000.000
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapian	2.226.053.000	1.057.493.000
17	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	2.226.053.000	1.057.493.000
46)	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	2.226.053.000	1.057.493.000
UPTD			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	578.800.000	594.906.000
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.695.000	196.695.000
47)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	70.000.000
48)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000	78.958.000
49)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.695.000	47.737.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
BANTEN TAHUN 2024

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (RP)	PAGU PERUBAHAN (RP)
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.105.000	398.211.000
50)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382.105.000	398.211.000
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	400.000.000	103.648.000
20	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000	103.648.000
51)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400.000.000	103.648.000
III	Program Pengelolaan Pelayaran	100.000.000	100.000.000
21	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000	100.000.000
52)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100.000.000	100.000.000
JUMLAH		111.516.129.104	118.141.592.380

Sumber: DPA dan DPAP Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Dinas perhubungan Provinsi Banten akan melaksanakan evaluasi penilaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun baik di level Gubernur dengan Kepala Dinas, Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV. Pengukuran evaluasi kinerja ini akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan melakukan evaluasi kinerja ini diharapkan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun ini akan dapat teratasi untuk tahun berikutnya. berikut adalah skala nilai dari peringkat kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91≤100	Sangat Tinggi
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2023 beberapa Capaian Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Dokumen Renstra Perubahan 2023 – 2026.

3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Untuk lebih jelas mengenai realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	73,16	76,23	104,20
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	70,00	70,00	100,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80,00	86,17	107,71
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	21,00	24,72	84,95

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Program Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
INDUK				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	98,00	98,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,00	88,00	88,00
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	100,00	100,00
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	50,00	50,00	100,00
UPTD				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Lalu	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program	100,00	86,00	86,00

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)			
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
INDUK							
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100
2.15.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100
2.15.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
2.15.01.1.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
2.15.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
2.15.01.1.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
2.15.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	100
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase	100	100	100
2.15.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	97	100
2.15.01.1.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100
2.15.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	100
2.15.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100
2.15.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100
2.15.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100
2.15.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1	100
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi	Persentase	100	100	100

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
2.15.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100
2.15.01.1.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	76	76	100
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase	100	100	100
2.15.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	100
2.15.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket	3	3	100,00
2.15.01.1.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100
2.15.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100
2.15.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	100

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.01.1.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	15	15	100
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100
2.15.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
2.15.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	87,35	87,35
2.15.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	65	62	95,38
2.15.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	74	74	100,00
2.15.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	2	66,67
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase	50	50	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.02.1.01.0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	1	100,00
2.15.02.1.01.0002		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	1	100,00
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase	75	75	100,00
2.15.02.1.02.0001		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	unit	28	28	100,00
2.15.02.1.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	unit	1860	1860	100,00
2.15.02.1.02.0003		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	unit	14	14	100,00
2.15.02.1.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	unit	230	230	100,00
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase	100	100	100,00
2.15.02.1.03.0001		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	1	100,00
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase	100	55,85	55,85
2.15.02.1.05.0003		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	7	5	71,43

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.02.1.05.0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	4	3	75,00
2.15.02.1.05.0005		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1	0	0,00
2.15.02.1.05.0007		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	unit	217	167	76,96
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase	100	75,00	75,00
2.15.02.1.07.0006		Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Dokumen	1	1	100,00
2.15.02.1.07.0011		Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	19	19	100,00
2.15.02.1.07.0012		Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	unit	20	20	100,00
2.15.02.1.07.0014		Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan	1	0	0,00
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase	100	100	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.02.1.08.0003		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	unit	2	2	100,00
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase	100	100	100,00
2.15.03.1.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	4	4	100,00
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase	100	100	100,00
2.15.03.1.09.0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	unit	1	1	100,00
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase	100	100	100,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.15.05.1.06.0001		Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	5	5	100,00
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN							
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	Persentase	100	100	100,00
2.15.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
2.15.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00
2.15.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	Persentase	100	100	100,00
2.15.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas		Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan	Persentase	100	86	86,00

Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPTD				
2.15.02.1.13.0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan	unit	100	86	86,00
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase	100	100	100,00
2.15.03.1.09.0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	unit	2	2	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Banten

**3.1.2. MEMBANDINGKAN ANATARA TARGET DAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN LALU**

Dalam perbandingan data realisasi kinerja terdapat beberapa perbedaan sarana dan indikator kinerja pada tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan sasaran kinerja pada tahun 2024, hal ini bisa terjadi karena perbedaan masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah selsai yaitu tahun 2017 – 2022.

Pada tahun 2023 Provinsi Baneten telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana RPD ini di susun berdasarkan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

dengan adanya transisi dari RPJMD menjadi RPD akan berdampak pada perbedaan sasaran dan indikator kinerja.

Untuk capaian kinrja pada tahun 2023 yaitu:

- 1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah target 69,77, realiasi 80,00, capaian 114,66
- 2. Rasio Konektifitas Provinsi target 70,00, realiasi 69,14 capaian 98,77
- 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi target 80, realiasi 80,00, capaian 100
- 4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan target 21,00, realiasi 21,00, capaian 100

Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Lalu

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cpaian	Target	Realisasi	Capaian
		2021	2022	2023	2021	2022	2023			2023	2023	2023	2024	2024	2024
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80,00	85,00	69,77	80,00	85,00	80,00	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah				73,16	76,20	104,16
Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	-	-	-	-	-	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi				70,00	70,00	100,00
	Prosentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	100,00	100,00	80,00	96,26	100,00	80,00		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi				80,00	86,17	107,71
Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	20,00	20,00	21,00	19,92	20,00	21,00		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan				21,00	24,72	84,95

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Lalu

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023			2024	2024	2024
INDUK															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	98,00	98,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,00	88,00	88,00
Program Pengeolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengeolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	100,00	100,00

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023			2024	2024	2024
Program Pengelola an Perkeretaap ian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengelolaan Perkeretaapi an	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	50,00	50,00	100,00
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00

Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian			Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023			2024	2024	2024
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	86,00	86,00
Program Pengeolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengeolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan atau Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Tahun Lalu

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	1	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102	102	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	97	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	100%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100%	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrgt 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Kuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	76	76	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	14	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	3	3	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	100%	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100%	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	77	77	100%	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	15	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
-	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
						Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	87,35	87,35%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	60	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	62	95%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	78	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74	74	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	67%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	100	100%	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100%	100%	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3	3	100%	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	1	100%
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	5	5	100%	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	1	100%
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	3	3	100%	-	-	-	-	-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100	100	100%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	75%	75%	100%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	11	11	100%	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	28	28	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	22	22	100%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1860	1860	100%
-	-	-	-	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	14	14	100%
-	-	-	-	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	230	230	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
					Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100%	100%	100%
					Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1	1	100%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah unit Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100	100	100%	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%	55,85%	55,85%
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	6	6	100%	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	7	5	71%
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	6	6	100%	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4	3	75%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Jumlah Laporan Pengawasan dan	6	6	100%	Forum Lalu Lintas dan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan	1	0	0%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			
-	-	-	-	-	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	217	167	77%
-	-	-	-	-	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	75,00%	75,00%
-	-	-	-	-	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	1	1	100%
-	-	-	-	-	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	19	19	100%
-	-	-	-	-	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	20	20	100%
-	-	-	-	-	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1	0	0%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	1	100%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	2	100%
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	100	100	100%	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar	100%	100%	100%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	2	2	100%	-	-	-	-	-

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	3	3	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	4	4	100%
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100%	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar	100	100	100%
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2	2	100%	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	1	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Jumlah dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100	100	100%	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100%	100%	100%
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	5	5	100%	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	5	5	100%
UPTD PENGELOLAAN BAHAN PERENCANAAN									
Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	100	100	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	100	100	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100%	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPTD	100%	86,00%	86,00%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem	1	1	100%	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan	100	86,00	86%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tsrget	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2023	2023	2023			2024	2024	2024
Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan			
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100 %	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar	100	100	100%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regiona	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	1	100%	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	2	2	100%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET KINERJA
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target pada renstra tahun 2023 – 2026 ada realisasi melebihi target capaian, hal ini terjadi karena realisasi dari indikator kinerha melebihi target yang di usulkan. Sementara untuk capain indikator lainnya sesuai dengan target yang telah disusun.

Tabel 3.8. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2024		Target Renstra 2024
						Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase	100,00	88,00	100,00
			Program Pengeolaan Pelayanan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase	100,00	88,00	100,00
			Program Pengeolaan Pelayanan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase	100,00	100,00	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2024		Target Renstra 2024
						Target	Realisasi	
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase	100,00	92,64	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

3.1.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET STANDAR NASIONAL

Pada tahun anggaran 2024 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Banten tidak memiliki program atau kegiatan yang mendukung indikator makro sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran atau perbandingan kinerja dengan Standar Nasional.

3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN PENURUNAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah diketahui sejauh mana kegagalan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, dengan diketahuinya keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan maka perlu diambil langkah – langkah antisipatif serta strategi dalam menanggulangi permasalahan yang ada sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi di kemudian hari.

Untuk lebih jelas mengenai penyebab keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1. Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- Sasaran 1 memiliki indikator berupa Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian pada dokumen
- berdasarkan hasil evaluasi internal hasil penilaian SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah 76,23 dimana capaian 104,20 dari target yang ditentukan sebesar 73,16. dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{76,23}{73,16} \times 100 = 104,20$$

Hasil dari penilaian SAKIP telah tercapai akan tetapi masih terdapat catatan yaitu:

- a. Untuk mengoptimalkan aktivitas kinerja dalam rencana aksi sebagai upaua dalam mencapai perjanjian kinerja.
- b. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas capaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah.

2. **Capaian Sasaran 2 Rasio Konektifitas Provinsi**

Capaian sasaran 2 merupakan pengukuran rasio konektivitas Provinsi dimana hal ini mengukur konektivitas antara moda transportasi yang ada di Wilayah Provinsi Banten dimana penghitungan rasio konektivitas provinsi ini mencakup bobot angkutan jalan ditambah dengan bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

untuk lebih jelas mengenai penghitungan Rasio Konektivitas Provinsi dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

$$= (IK\ 1 \times \text{Bobot angkutan jalan}) + (IK\ 2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$$
$$= (1 \times 70) + (0 \times 30)$$
$$= 70 + 0$$
$$= 70$$

Dari capain rasio konetifitas ini terdapat penurunan capaian hal ini dikarenakan adanya trayek yang pengelolaan nya sudah tidak efektif sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap jaringan trayek.

➤ **Capaian Sasaran 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi**

Untuk mengukur indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten melakukan survei kepda masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan perhubungan kepada masyarat, target yang telah ditentukan senilai 80, untuk mengetahui beberapa point yang dinilai dari IKM Sektor Transportasi sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1) Perlintasan Kereta Api | Nilai: 92,25 (Puas) |
| 2) Penerangan Jalan Umum | Nilai: 81,58 (Puas) |
| 3) Halte Umum | Nilai: 81,25 (Puas) |

4) Marka Nilai: 89,58 (Puas)

Hasil rata – rata Nilai: 80,00 (puas)

Berdasarkan hasil keseluruhan nilai rata – rata IKM Dinas Perhubungan mendapat nilai 80
maka secara capaian telah 100%

$$\frac{86,17}{80} \times 100 = 107,71$$

akan tetapi ada point dari penilaian yang masih kurang baik, oleh karena itu akan dilakukan
evaluasi terhadap penilaian yang kurang baik tersebut.

➤ **Capaian Sasaran 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan**

berdasarkan dari hasil pengukutran internal untuk sasaran capian 3 rasio kejadian kecelakaan
transportasi per 100 ribu keberangkatan Dinas Perhubungan mendapat nilai 21 dari target nilai
21 dengan capain sebesar 100%

$$\frac{24,72}{21} \times 100 = 84,95$$

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2024 adalah sebagai
berikut:

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	73,16	76,23	104,20	- Untuk mengoptimalkan aktivitas kinerja dalam rencana aksi sebagai upaua dalam mencapai perjanjian kinerja. - Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas capaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah	Melakukan koordinasi dan perbaikan pada capain kinerja yang dirasa belum memenuhi capaian kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	70,00	70,00	100,00	- Terdapat beberapa trayek angkutan umum yang telah dilimpahkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ke Dinas Perhubungan Provinsi Banten - Belum terdapat pelayanan terkait angkutan lintas penyeberangan yang di selenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten	- Perlu disusun Peraturan Gubernur Provinsi Banten terkait trayek angkutan umum terbaru pelimpahan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota - Perlu dilakukan kajian identifikasi terkait angkutan lintas penyeberangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80,00	86,17	107,71	- Tingginya angka kepuasan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan terkait pengelolaan dan pengawasan perlintasan kereta api - terdapat potensi untuk meningkatkan kualitas penerangan di beberapa area, terutama di wilayah yang kurang terang atau rawan kecelakaan. - Beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti fasilitas di halte, kenyamanan bagi penumpang, serta integrasi halte dengan moda transportasi lainnya. - terdapat potensi untuk meningkatkan kualitas marka di beberapa area,	- mengintensifkan penyebaran informasi saluran pengaduan seperti nomor contact, outube, facebook, instagram di eberapa titik penting di sekitar fasilitas - mengintensifkan sekaligus komunikasi dari masyarakat pengguna utilitas kepada para pihak pemilik utilitas menjadi satu saluran channel komunikasi, misalnya perlintasan kereta api yang menjadi tanggung jawab PT. Kereta Api dan Pemerintah Provinsi, PJU. - memperbanyak kontain pemeliharaan pelayanan publik pada saluran media komunikasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
					terutama di wilayah yang kurang terang atau rawan kecelakaan.	dan informasi yang dikelola pemerintah Provinsi Banten lintas urus yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. 4. mengoptimalkan ruang publik sebagai media komunikasi dan informasi, seperti di sekitar perlintasan kereta api dan lampu merah, yang memaksa pengguna jalan berhenti untuk mendengarkan informasi layanan pengaduan sarana prasarana layanan public.
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	21,00	24,72	84,95	Meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi dapat di akibatkan beberapa faktor diantaranya: 1. Faktor kelalain manusia 2. Faktor prasaranan dan sarana lalu lintas 3. Faktor Alam	Perlu dilakukan kajian berupa identifikasi faktor peningkatan angka kecelakaan dan melakukan rencana aksi dari hasil kajian tersebut.

Sumber: Dnas Perhubungan Provinsi Banten

3.1.6. ANALISIS ATAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan didukung dengan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diman dalam pelaksanaanya perlu dilakukan analisis kebutuhan sehingga dapat memilih kebutuhan prioritas dan menghindari penggunaan anggran yang mubazir dan memenuhi azas efektif dan efisien.

Tabel 3.10. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,16	76,23	104,20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.484.657.100	38.371.001.263	94,78
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	Nilai	70,00	70,00	100,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	75.810.981.280	71.827.349.466	94,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80,00	86,17	107,71	Program Pengelolaan Pelayaran	992.109.000	846.883.707	85,36
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	Nilai	21,00	24,72	84,95	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.057.493.000	799.419.807	75,60
Tingkat Efisiensi										5,49
Tingkat Efektifitas										105,81

Sumber Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Untuk tingkat efektifitas dan efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11. Tingakt Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,16	76,20	104,16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.484.657.100	38.371.001.263	94,78
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	Ratio	70,00	70,00	100,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	75.810.981.280	71.827.349.466	94,75
						Program Pengelolaan Pelayaran	992.109.000	846.883.707	85,36
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80,00	86,17	107,71	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	75.810.981.280	71.827.349.466	94,75
						Program Pengelolaan Pelayaran	992.109.000	846.883.707	85,36
						Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.057.493.000	799.419.807	75,60
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	Ratio	21,00	24,72	84,95	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	75.810.981.280	71.827.349.466	94,75

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Table 3.12 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisisnsi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
DINAS PERHUBUNGAN			100	98,30	98,30	118.141.592.380	111.551.990.171	94,42	5,58%
INDUK			100	96,60	96,60	117.343.038.380	110.869.404.357	94,48	5,52%
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	98,42	98,42	39.686.103.100	37.688.415.449	94,97	5,03%
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	661.300.000	589.207.151	89,10	10,90%
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100	100	100	26.070.324.000	24.527.200.456	94,08	5,92%
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	9.500.000	9.136.000	96,17	3,83%
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	53.000.000	49.288.500	93,00	7,00%
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100	100	100	644.198.200	618.954.909	96,08	3,92%
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	79.993.500	73.351.400	91,70	8,30%
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	10.605.470.400	10.326.490.358	97,37	2,63%
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	87,35	87,35	1.562.317.000	1.494.786.675	95,68	4,32%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	88	88	75.707.333.280	71.729.138.466	94,75	5,25%

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100	100	100	450.000.000	378.741.520	84,16	15,84%
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100	100	100	36.616.109.580	34.941.947.260	95,43	4,57%
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100	100	100	180.000.000	162.882.505	90,49	9,51%
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	100,00	55,85	55,85	30.689.488.400	29.352.831.475	95,64	4,36%
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	75	75,00	5.586.771.500	5.412.137.270	96,87	3,13%
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100,00	2.184.963.800	1.480.598.436	67,76	32,24%
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100	100	100	892.109.000	652.430.635	73,13	26,87%
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	100	100	100,00	542.109.000	347.741.795	64,15	35,85%
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100,00	350.000.000	304.688.840	87,05	12,95%

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	100	100	100	1.057.493.000	799.419.807	75,60	24,40 %
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	100	100	100,00	1.057.493.000	799.419.807	75,60	24,40%
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN			100	100	100	798.554.000	682.585.814	85,48	14,52 %
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100	100	100	594.906.000	536.910.914	90,25	9,75 %
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100,00	196.695.000	173.860.292	88,39	11,61%
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	100	100	100	398.211.000	363.050.622	91,17	8,83%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	100	100	100	103.648.000	98.211.000	94,75	5,25 %
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPTD	100	100	100	103.648.000	98.211.000	94,75	5,25%
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan	100	100	100	100.000.000	47.463.900	47,46	52,54%

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
		Pelayaran (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)							
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100	100	100	100.000.000	47.463.900	47,46	52,54%

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

**3.1.7. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Pada anggaran tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki 4 Program yang menjadi penunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 3. Program Pengelolaan Pelayaraan
- 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

untuk lebih jelas mengenai rincian program dan kegiatan yang menunjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13. Analisis Program Kegiatan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Tujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah						
	Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	104,16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98,42	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100,00	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	Menunjang
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera SKPD dan Laporan Koordinasi	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100,00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	100,00	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					SKPD		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,35	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95,38	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66,67	Menunjang
2	Tujuan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi						
	Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Rasio Konektifitas Provinsi	98,77	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	88,00	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100,00	
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100,00	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100,00	
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	100,00	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	55,85	
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	71,43	Menunjang
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	75,00	Menunjang
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0,00	Menunjang
				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	76,96	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	75,00	
				Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	100,00	Menunjang
				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	100,00	Menunjang
				Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	100,00	Menunjang
				Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	0,00	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,00	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	100,00	Menunjang
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,00	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	100,00	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	98,53	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	88,00	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100,00	
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100,00	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100,00	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100,00	
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	100,00	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	55,85	
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	71,43	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	75,00	Menunjang
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0,00	Menunjang
				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	76,96	Menunjang
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	75,00	
				Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	100,00	Menunjang
				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	100,00	Menunjang
				Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	100,00	Menunjang
				Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	0,00	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
					Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	100,00	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	100,00	Menunjang
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,00	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan	100,00	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan dan Pengoperasian		
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian	100	
				Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	100,00	Menunjang
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	88,00	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	100,00	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	100,00	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100,00	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100,00	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	100,00	
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	100,00	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	55,85	
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	71,43	Menunjang
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	75,00	Menunjang
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0,00	Menunjang
				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang	76,96	Menunjang

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan		
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	75,00	
				Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	100,00	Menunjang
				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	100,00	Menunjang
				Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	100,00	Menunjang
				Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	0,00	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100,00	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100,00	Menunjang
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	

No	Tujuan dan sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	100,00	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	100,00	Menunjang
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	100,00	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	100,00	Menunjang

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Penyesuaian Strategi dan Kebijakan atas capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang diuraikan, maka diperlukan beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kebijakan pada tahun mendatang, sebagai berikut :

- 3. Penyesuaian aktivitas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan indikator kinerja sasaran dan program pada dokumen perencanaan kinerja;
- 4. Penyesuaian anggran melalui evaluasi pelaksanaan kgiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indicator kinerja utama organisasi

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk medukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;
- 2. Komitmen dalam peningkatan kompetensi SDM agar mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai tupoksinya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2024 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 111.516.129.104,00 dimana sampai dengan bulan September 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 48.195.854.193,00 dengan prosentase capaian sebesar 43,22%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 111.516.129.104,00 menjadi Rp. 118.141.592.380,00 atau bertambah sebesar Rp. 6.625.463.276,00 dimana pada akhir penggaran perubahan 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 111.551.990.171,00 dengan prosentase capaian sebesar 94,42%.

Untuk lebih jelas mengenai realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
INDUK										
2.15.01.1.01	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100,00	661.300.000	589.207.151	89,10	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	153.000.000	131.508.867	85,95	
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	100,00	10.000.000	9.540.112	95,40	
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	1	100,00	10.000.000	9.602.272	96,02	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
		Perubahan DPA-SKPD								
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	1	100,00	10.000.000	600.000	6,00	
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00	10.000.000	9.191.400	91,91	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	100,00	350.000.000	330.740.500	94,50	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	100,00	118.300.000	98.024.000	82,86	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase	100	100	100,00	26.070.324.000	24.527.200.456	94,08	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	97	100,00	25.017.459.000	23.908.133.776	95,57	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	885.950.000	504.738.000	56,97	
2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	100,00	88.325.000	54.453.200	61,65	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	100,00	1.150.000	985.000	85,65	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
		Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100,00	34.971.000	20.272.000	57,97	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100,00	34.944.000	31.471.280	90,06	
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1	100,00	7.525.000	7.147.200	94,98	
2.15.01.1.03	Administras i Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi	Persentase	100	100	100,00	9.500.000	9.136.000	96,17	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100,00	9.500.000	9.136.000	96,17	
2.15.01.1.05	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100,00	53.000.000	49.288.500	93,00	
2.15.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	76	76	100,00	53.000.000	49.288.500	93,00	
2.15.01.1.06	Administras i Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase	100	100	100,00	644.198.200	618.954.909	96,08	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	14	14	100,00	307.500.000	296.531.859	96,43	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
		Kantor yang Disediakan								
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	3	3	100,00	56.000.000	53.852.400	96,17	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	55.000.000	54.241.000	98,62	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	195.698.200	186.193.150	95,14	
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	30.000.000	28.136.500	93,79	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	100,00	79.993.500	73.351.400	91,70	
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	unit	15	15	100,00	79.993.500	73.351.400	91,70	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100,00	10.605.470.400	10.326.490.358	97,37	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	600.470.400	478.728.947	79,73	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	10.005.000.000	9.847.761.411	98,43	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase	100	87,35	87,35	1.562.317.000	1.494.786.675	95,68	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
		Pemerintahan Daerah								
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	65	62	95,38	1.169.364.000	1.114.233.960	95,29	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	74	74	100,00	50.000.000	47.155.976	94,31	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	unit	3	2	66,67	342.953.000	333.396.739	97,21	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Rencana Induk	Persentase	50	50	100,00	450.000.000	378.741.520	84,16	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	LLAJ Provinsi	Jaringan LLAJ Provinsi								
2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	250.000.000	189.684.020	75,87	
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provins	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	1	100,00	200.000.000	189.057.500	94,53	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provins	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase	75	75	100,00	36.616.109.580	34.941.947.260	95,43	
2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provins	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	unit	28	28	100,00	7.447.567.600	7.198.417.507	96,65	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	unit	1860	1860	100,00	22.662.300.050	21.609.969.525	95,36	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Jalan di Jalan Provinsi	Provinsi yang Tersedia								
2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	unit	14	14	100,00	346.212.800	323.085.410	93,32	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	unit	230	230	100,00	6.160.029.130	5.810.474.818	94,33	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase	100	100	100,00	180.000.000	162.882.505	90,49	
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	1	100,00	180.000.000	162.882.505	90,49	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Persentase	100	55,85	55,85	30.689.488.400	29.352.831.475	95,64	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Jalan Provinsi	Jaringan Jalan Provinsi								
2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	7	5	71,43	642.669.000	462.022.656	71,89	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	4	3	75,00	2.785.896.000	2.363.894.870	84,85	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1	0	0,00	50.000.000	-	0,00	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka		217	167	76,96	27.210.923.400	26.526.913.949	97,49	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan								
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamata n LLAJ di Jalan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase	100	75	75,00	5.586.771.500	5.412.137.270	96,87	
2.15.02.1.07.0006	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Dokumen	1	1	100,00	30.000.000	21.692.000	72,31	
2.15.02.1.07.0011	Pembanguna n Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	19	19	100,00	5.496.468.500	5.345.185.270	97,25	
2.15.02.1.07.0012	Pembanguna n Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	unit	20	20	100,00	46.633.000	45.260.000	97,06	
2.15.02.1.07.0014	Pelaksanaan Inspeksi	Jumlah laporan Inspeksi	Laporan	1	0	0,00	13.670.000	-	0,00	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe	Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan								
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase	100	100	100,00	2.184.963.800	1.480.598.436	67,76	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	unit	2	2	100,00	2.184.963.800	1.480.598.436	67,76	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha	Persentase Ketercapaian	Persentase	100	100	100,00	542.109.000	347.741.795	64,15	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi								
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provins	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	4	4	100,00	542.109.000	347.741.795	64,15	
2.15.03.1.09	Pembangun an, Penerbitan Izin Pembangunan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin	Persentase	100	100	100,00	350.000.000	304.688.840	87,05	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	an dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	unit	1	1	100,00	350.000.000	304.688.840	87,05	
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase	100	100	100,00	1.057.493.000	799.419.807	75,60	
2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	Dokumen	5	5	100,00	1.057.493.000	799.419.807	75,60	

Kode	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan								
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN										
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	Persentase	100	100	100,00	196.695.000	173.860.292	88,39	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00	70.000.000	58.286.812	83,27	
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00	78.958.000	71.356.173	90,37	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00	47.737.000	44.217.307	92,63	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan)	Persentase	100	100	100,00	398.211.000	363.050.622	91,17	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00	398.211.000	363.050.622	91,17	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	Persentase ketercapaian kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	86	86,00	103.648.000	98.211.000	94,75	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (UPTD								
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan	unit	100	86	86,00	103.648.000	98.211.000	94,75	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan	Persentase	100	100	100,00	100.000.000	47.463.900	47,46	

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
	an Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	unit	2	2	100,00	100.000.000	47.463.900	47,46	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Banten

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESEMPULAN

Dari akuntabilitas kinerja pada BAB III dapat disimpulkan bahwa Dinas Pehugungan Provinsi Banten memiliki 4 (empat) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Capaaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja dari 5 indikator kinerja yang telah di tetapkan pada tahun 2023 diperoleh beberapa nilai capaian sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1. Capaian indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Banten memiliki target sebesar 73,16 satuan nilai, realisasi sebesar 76,23 satuan nilai dengan capain sebesar 104,20 persen.
2. Capaian indikator Rasio Konektifitas Provinsi memiliki target sebesar 70 satuan nilai, realisasi sebesar 70 satuan nilai dengan capaian 100 persen.
3. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi memiliki target sebesar 80 satuan nilai, realisasi sebesar 86,17 satuan nilai dengan capaian 107,71 persen.
4. Capaian indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan memiliki target sebesar 21 satuan nilai, realisasi sebesar 24,72 satuan nilai dengan capaian 84,95 persen.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2024 memiliki anggaran murni sebesar Rp. 111.516.129.104,00 dimana sampai dengan bulan September 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 48.195.854.193,00 dengan prosentase capaian sebesar 43,22%.

Sementara untuk anggaran perubahan Dinas Perhubungan semula memiliki anggaran sebesar Rp. 111.516.129.104,00 menjadi Rp. 118.141.592.380,00 atau bertambah sebesar Rp. 6.625.463.276,00 dimana pada akhir penggaran perubahan 2024 realisasi keuangan mencapai Rp. 111.551.990.171,00 dengan prosentase capaian sebesar 94,42%.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pehubungan tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan penyusunanya oleh kerena itu perlu diusulkan beberapa rekomendasi sebagai bahan evaluasi penyusunan lapaoran selanjutya.

1. Sebelum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) ini perlu dilakukan rapat pada setiap bidang untuk menyampaikan progres capaian program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan gaambaran secara teknis tata cara penyunan LKjIP.
3. Melakukan *Update* data untuk mendapatkan informasi terbaru agar dalam penyusunan LKjIP dapat lebih akurat.
4. Melakukan evaluasi internal sebelum laporan ini disampaikan pada instansi berwenang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan Penyusunan LKjIP ini.

LAMPIRAN I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AL MUKTABAR

Serang, Januari 2024
Pihak Pertama,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**DPA TA-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,73
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	83
	SASARAN INTERNAL			
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4.1.02	Retribusi Daerah	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	111.516.129.104
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.981.549.824
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	64.588.526.280
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.720.000.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.226.053.000
	JUMLAH BELANJA	111.516.129.104

Pj. GUBERNUR BANTEN,**AL MUKTABAR****KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,****TRI NURTOPO, MT****NIP. 19660530 199003 1 003**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pihak Kedua,



AL MUKTABAR

Serang, 2024

Pihak Pertama,



TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

SATUAN KERJA : BADAN PENGHUBUNG
DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Capaian Pelayanan Penghubung	Survei yang dilakukan Badan pneghubung terhadap penerima pelayanan badan penghubung dengan menggunakan metode survei Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi * nilai penimbang (skm unit pelayanan * 25)	Indeks	3	4	4	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	111.516.129.104	118.141.592.380	6.625.463.276
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.981.549.824	40.281.009.100	(2.700.540.724)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	64.588.526.280	75.810.981.280	11.222.455.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.720.000.000	992.109.000	(727.891.000)
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.226.053.000	1.057.493.000	(1.168.560.000)
	JUMLAH	111.516.129.104	118.141.592.380	6.625.463.276

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

LAMPIRAN II



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 8 Maret 2025

**Plt. Inspektur Daerah,
Provinsi Banten**



Dr. Dra Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003